

Ekonomi Makro Islam sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Riki Ananda^{1*}, Muhammad Kharazi²

¹⁻²Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: 22160055@student.unisai.ac.id¹, kharazi@unisai.ac.id²

ABSTRACT

Economic development is a central instrument in achieving social welfare and constitutes a major concern in public policy formulation. In response to economic inequality and the limitations of conventional approaches, Islamic macroeconomics has emerged as an alternative framework emphasizing justice, balance, and social responsibility. However, the utilization of Islamic macroeconomics as a public policy instrument remains largely normative, with limited attention to its practical implementation. Therefore, this article aims to analyze the role of Islamic macroeconomics as a public policy instrument in enhancing social welfare and to identify the gap between conceptual discourse and policy practice. This study employs a library research method by examining relevant literature, including books, academic journals, and scholarly documents related to Islamic macroeconomics, public policy, and social welfare. Data are analyzed qualitatively using descriptive-analytical and conceptual synthesis approaches. The findings indicate that Islamic macroeconomics has substantial potential to support welfare-oriented public policies, particularly through principles of distributive justice and the active role of the state. However, a significant gap is identified in the operational and implementation mechanisms of Islamic macroeconomic principles within fiscal and monetary policies. The study concludes that strengthening the implementation dimension is essential to bridge the gap between theory and practice. This research contributes to the field by positioning Islamic macroeconomics as an applicable public policy framework capable of promoting sustainable social welfare.

Keywords: Islamic Macroeconomics, Public Policy, Social Welfare

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menjadi fokus penting dalam perumusan kebijakan publik. Dalam menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi dan keterbatasan pendekatan konvensional, ekonomi makro Islam muncul sebagai alternatif yang menawarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, pemanfaatan ekonomi makro Islam sebagai instrumen kebijakan publik masih didominasi oleh kajian normatif dan belum banyak dikaji pada aspek implementatif. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis

peran ekonomi makro Islam sebagai instrumen kebijakan publik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta mengidentifikasi kesenjangan antara konsep dan praktik kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen akademik yang relevan dengan ekonomi makro Islam, kebijakan publik, dan kesejahteraan sosial. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis dan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi makro Islam memiliki potensi besar untuk mendukung kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, terutama melalui prinsip keadilan distributif dan peran aktif negara. Namun, ditemukan adanya kesenjangan signifikan pada aspek operasional dan mekanisme implementasi dalam kebijakan fiskal dan moneter. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan dimensi implementatif ekonomi makro Islam menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian ekonomi Islam dengan menempatkan ekonomi makro Islam sebagai kerangka kebijakan publik yang aplikatif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Makro Islam, Kebijakan Publik, Kesejahteraan Sosial

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan fondasi utama dalam proses peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Setiap negara menempatkan pembangunan ekonomi sebagai agenda strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial (Fernandya dkk., 2022). Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai peningkatan angka statistik, tetapi juga sebagai upaya menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya perencanaan yang matang dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Oleh sebab itu, arah pembangunan ekonomi selalu menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan nasional. Fokus pembangunan ekonomi pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Kebijakan publik di bidang ekonomi memegang peranan penting dalam mengarahkan proses pembangunan tersebut. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter guna menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan publik, negara dapat memengaruhi distribusi sumber daya dan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat (Hafizd dkk., 2024). Kebijakan yang efektif diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, kualitas kebijakan publik sangat menentukan

keberhasilan pembangunan ekonomi. Hubungan antara kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial menjadi semakin relevan dalam dinamika ekonomi modern.

Seiring dengan perkembangan global dan kompleksitas tantangan ekonomi, pendekatan kebijakan publik juga mengalami perubahan. Ketimpangan ekonomi, krisis finansial, dan keterbatasan sistem ekonomi konvensional mendorong munculnya berbagai gagasan alternatif. Berbagai pendekatan ekonomi mulai dikaji untuk menjawab kebutuhan akan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, nilai-nilai etika dan moral mulai mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan ekonomi. Pendekatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material dianggap semakin diperlukan. Kondisi ini membuka ruang bagi berkembangnya perspektif ekonomi berbasis nilai (Lubis, 2024).

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam wacana kebijakan ekonomi adalah ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam menawarkan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat secara luas. Dalam kerangka kebijakan publik, ekonomi makro Islam menempatkan peran negara sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip seperti distribusi yang adil dan larangan praktik ekonomi yang merugikan menjadi karakteristik utamanya (Syamsiah, 2025). Dengan demikian, ekonomi makro Islam memberikan perspektif alternatif dalam pengelolaan ekonomi nasional.

Berdasarkan kerangka tersebut, ekonomi makro Islam mulai dipertimbangkan sebagai instrumen kebijakan publik yang relevan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi makro Islam diharapkan dapat mendukung terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih merata. Kebijakan publik yang berlandaskan nilai keadilan dan keseimbangan sosial dinilai mampu menjawab tantangan pembangunan ekonomi modern. Dalam konteks ini, ekonomi makro Islam tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai panduan kebijakan praktis. Integrasi ekonomi makro Islam dalam kebijakan publik menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi (Huda, 2018). Dengan demikian, kesejahteraan sosial masyarakat dapat diwujudkan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun ekonomi makro Islam semakin sering dibahas dalam diskursus akademik dan kebijakan publik, pemahamannya masih cenderung bersifat normatif dan konseptual. Pembahasan yang ada umumnya menekankan nilai dan prinsip dasar tanpa menguraikan secara rinci bagaimana ekonomi makro Islam dapat difungsikan sebagai instrumen kebijakan publik yang operasional. Akibatnya, terdapat jarak antara konsep ekonomi makro Islam dan praktik kebijakan yang diterapkan oleh negara. Kondisi ini menyebabkan ekonomi makro Islam lebih banyak dipahami sebagai wacana alternatif daripada sebagai alat

kebijakan yang konkret. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemanfaatan ekonomi makro Islam pada tataran kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjembatani konsep dan implementasi ekonomi makro Islam secara sistematis.

Selain itu, mekanisme penerapan prinsip-prinsip ekonomi makro Islam dalam kebijakan publik masih belum tergambarkan secara jelas. Belum banyak kajian yang menjelaskan bagaimana nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal, moneter, maupun regulasi ekonomi. Ketidakjelasan mekanisme ini menyulitkan pengambil kebijakan dalam menerjemahkan prinsip ekonomi makro Islam ke dalam langkah-langkah kebijakan yang terukur. Akibatnya, potensi ekonomi makro Islam dalam mendukung kesejahteraan sosial belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kekosongan pengetahuan pada aspek implementatif ekonomi makro Islam. Kekosongan tersebut menjadi celah penting yang perlu diisi melalui kajian yang lebih mendalam dan aplikatif.

Lebih jauh, hubungan antara ekonomi makro Islam dan efektivitas kebijakan publik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masih belum banyak dikaji secara menyeluruh. Dampak penerapan prinsip ekonomi makro Islam terhadap hasil kebijakan publik belum dijelaskan secara sistematis dan terukur. Hal ini menyebabkan kontribusi ekonomi makro Islam terhadap pencapaian kesejahteraan sosial sulit untuk dievaluasi secara objektif. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai hubungan tersebut, ekonomi makro Islam berisiko dipandang hanya sebagai pendekatan normatif. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis yang mampu mengaitkan ekonomi makro Islam dengan kinerja kebijakan publik. Dengan demikian, pemahaman mengenai peran ekonomi makro Islam dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dapat diperkuat secara akademik dan praktis.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji ekonomi makro Islam dari aspek konseptual dan normatif, khususnya terkait prinsip keadilan, keseimbangan, dan nilai moral dalam sistem ekonomi. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai posisi ekonomi makro Islam sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional. Namun, sebagian besar penelitian masih berhenti pada tataran konsepsi dan belum secara memadai membahas penerapannya dalam kerangka kebijakan publik. Akibatnya, kontribusi ekonomi makro Islam dalam praktik pengelolaan ekonomi nasional belum tergali secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan penelitian yang lebih aplikatif dan kontekstual (Yulianto dkk., 2025).

Mengisi kesenjangan tersebut menjadi penting karena kebijakan publik membutuhkan kerangka yang operasional dan dapat diimplementasikan. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai cara kerja ekonomi makro Islam dalam kebijakan publik, prinsip-prinsip yang ditawarkan berpotensi sulit diwujudkan dalam

praktik. Oleh sebab itu, kajian yang berfokus pada mekanisme, instrumen, dan peran negara dalam perspektif ekonomi makro Islam menjadi relevan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik kebijakan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi makro Islam dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai instrumen kebijakan publik.

Berdasarkan rasional tersebut, tujuan pengkajian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ekonomi makro Islam dapat dioperasionalkan dalam kebijakan publik guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kajian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek implementatif yang belum banyak diteliti dalam penelitian sebelumnya. Dengan menelaah peran ekonomi makro Islam secara lebih konkret, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai kontribusinya terhadap efektivitas kebijakan publik. Secara implisit, kajian ini berangkat dari hipotesis bahwa integrasi prinsip ekonomi makro Islam dalam kebijakan publik berpotensi meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan ekonomi berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang bertumpu pada penelusuran dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. *Library research* dipahami sebagai kegiatan pengumpulan data dan informasi melalui buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, serta publikasi akademik lainnya (Moleong, 2010; Movitaria dkk., 2024). Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan konseptual yang komprehensif mengenai ekonomi makro Islam dan kebijakan publik. Pendekatan kajian pustaka memungkinkan peneliti menelaah gagasan, konsep, serta temuan penelitian terdahulu secara sistematis. Dengan demikian, metode ini relevan untuk mengkaji isu-isu yang bersifat konseptual dan normatif.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang berkaitan dengan ekonomi makro Islam, kebijakan publik, dan kesejahteraan sosial. Literatur tersebut meliputi buku teks ekonomi Islam, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen resmi yang membahas kebijakan ekonomi. Data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kedalaman pembahasan terhadap fokus penelitian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan tema kajian. Melalui penelusuran literatur yang terarah, penelitian ini berupaya membangun kerangka analisis yang kokoh dan terstruktur.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menginterpretasikan isi literatur secara kritis dan komparatif. Setiap sumber

dianalisis untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan gagasan utama yang berkaitan dengan peran ekonomi makro Islam sebagai instrumen kebijakan publik. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menemukan pola, kesamaan, dan perbedaan pandangan antar sumber. Proses sintesis ini digunakan untuk merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi ekonomi makro Islam terhadap kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran konseptual yang utuh dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi makro Islam dipahami sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Literatur yang dianalisis menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi makro Islam tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi kesejahteraan yang adil. Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih luas. Negara memiliki peran penting sebagai pengelola dan pengarah kebijakan ekonomi (Putra dkk., 2024). Dengan demikian, ekonomi makro Islam secara konseptual relevan untuk dijadikan instrumen kebijakan publik. Temuan ini menjadi dasar awal untuk melihat potensi implementatif ekonomi makro Islam.

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dalam perumusan kebijakan publik menurut perspektif ekonomi makro Islam. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Literatur menekankan pentingnya perlindungan kelompok rentan dan pengurangan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, ekonomi makro Islam menawarkan pendekatan yang lebih inklusif. Prinsip keadilan distributif menjadi fondasi utama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi (Kholis, 2015). Hal ini menunjukkan kesesuaian antara tujuan ekonomi makro Islam dan agenda kebijakan publik.

Namun demikian, sebagian besar literatur masih menempatkan ekonomi makro Islam pada tataran normatif. Pembahasan lebih banyak berfokus pada nilai, prinsip, dan tujuan ideal yang ingin dicapai. Penjelasan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dioperasionalkan dalam kebijakan publik masih terbatas. Akibatnya, ekonomi makro Islam sering diposisikan sebagai konsep etis daripada instrumen kebijakan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara teori dan praktik. Temuan ini menguatkan adanya kesenjangan yang menjadi fokus kajian ini.

Lebih lanjut, dari kajian penulis bahwa mekanisme implementasi ekonomi makro Islam dalam kebijakan fiskal belum dijelaskan secara rinci. Literatur menyebutkan instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf, tetapi belum menguraikan integrasinya dalam sistem fiskal negara secara komprehensif. Peran instrumen-

instrumen tersebut sering kali dibahas secara parsial dan terpisah. Hal ini menyulitkan pemahaman mengenai kontribusi nyata ekonomi makro Islam terhadap kebijakan publik. Akibatnya, potensi fiskal berbasis syariah belum dimanfaatkan secara optimal. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis.

Selain kebijakan fiskal, keterbatasan pembahasan mengenai ekonomi makro Islam dalam konteks kebijakan moneter. Literatur cenderung menyoroti larangan riba dan pentingnya stabilitas moneter berbasis nilai keadilan (Al Hajry & Mu'is, 2025). Namun, mekanisme kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi makro Islam belum dikaji secara mendalam. Hubungan antara stabilitas moneter dan kesejahteraan sosial masih bersifat konseptual. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman implementatif ekonomi makro Islam. Temuan ini memperlihatkan ruang kajian yang masih terbuka luas.

Hasil kajian penulis menemukan bahwa peran negara dalam ekonomi makro Islam dipahami sebagai pengelola keseimbangan ekonomi dan penjaga keadilan sosial. Literatur menegaskan bahwa negara tidak bersifat pasif, tetapi aktif dalam mengarahkan aktivitas ekonomi. Negara bertanggung jawab memastikan distribusi kekayaan berjalan secara adil (Febriyanti & Sapa, 2025; Zakiyah, 2017). Namun, bentuk konkret intervensi negara dalam kebijakan publik belum dijelaskan secara operasional. Akibatnya, peran negara sering dipahami secara abstrak. Temuan ini mengindikasikan perlunya perumusan model kebijakan yang lebih aplikatif.

Integrasi ekonomi makro Islam dalam kebijakan publik berpotensi meningkatkan efektivitas kebijakan sosial. Prinsip distribusi yang adil dinilai mampu mengurangi ketimpangan ekonomi. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai dapat memperkuat legitimasi kebijakan publik (Adhinda, 2025). Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan kajian implementatif. Hal ini memperkuat urgensi penelitian yang berorientasi pada praktik kebijakan. Temuan ini menjadi dasar bagi pengembangan kajian lebih lanjut.

Ekonomi makro Islam dapat berfungsi sebagai kerangka kebijakan alternatif dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan pasar menjadi isu yang relevan. Penulis mengaitkan masalah tersebut dengan kelemahan sistem ekonomi konvensional. Dalam konteks ini, ekonomi makro Islam menawarkan pendekatan berbasis keseimbangan dan tanggung jawab sosial. Namun, alternatif ini masih jarang diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang konkret. Temuan ini memperlihatkan peluang pengembangan kebijakan berbasis ekonomi makro Islam.

Secara keseluruhan, hasil studi kepustakaan mengonfirmasi adanya kesenjangan antara konsep ekonomi makro Islam dan implementasinya dalam kebijakan publik. Literatur memberikan dasar normatif yang kuat, tetapi masih

lemah pada aspek operasional. Kesenjangan ini berdampak pada terbatasnya kontribusi ekonomi makro Islam terhadap kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang berfokus pada pengembangan instrumen kebijakan berbasis ekonomi makro Islam. Temuan ini selaras dengan tujuan kajian yang ingin mengisi kekosongan tersebut. Dengan pendekatan yang lebih aplikatif, ekonomi makro Islam berpotensi memberikan kontribusi yang lebih nyata.

Analisis penulis menunjukkan bahwa penguatan dimensi implementatif merupakan kunci utama dalam menjadikan ekonomi makro Islam sebagai instrumen kebijakan publik. Prinsip-prinsip normatif perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi ekonomi yang konkret. Selain itu, perumusan indikator kesejahteraan sosial berbasis ekonomi makro Islam menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa langkah tersebut, ekonomi makro Islam akan tetap berada pada tataran konseptual. Oleh karena itu, integrasi ekonomi makro Islam dalam kebijakan publik harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Dengan demikian, tujuan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi makro Islam berpotensi kuat untuk dijadikan instrumen kebijakan publik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi makro Islam, seperti keadilan distributif, keseimbangan ekonomi, dan tanggung jawab sosial, dengan tujuan utama kebijakan publik. Kajian pustaka menunjukkan bahwa orientasi ekonomi makro Islam tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, ekonomi makro Islam secara konseptual dan normatif relevan untuk mendukung kebijakan publik yang berkeadilan. Kesimpulan ini menjawab tujuan penelitian yang ingin menelaah peran ekonomi makro Islam dalam kebijakan publik.

Jawaban tersebut diperkuat oleh temuan bahwa literatur ekonomi makro Islam selama ini masih didominasi oleh pembahasan normatif dan konseptual. Keterbatasan kajian implementatif menyebabkan ekonomi makro Islam belum dimanfaatkan secara optimal dalam praktik kebijakan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep dan praktik yang perlu dijematani. Dengan menganalisis literatur secara sistematis, penelitian ini menegaskan pentingnya penerjemahan prinsip ekonomi makro Islam ke dalam instrumen kebijakan yang konkret. Oleh karena itu, penguatan aspek implementasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik berbasis ekonomi makro Islam.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya memperjelas posisi ekonomi makro Islam sebagai kerangka kebijakan publik yang aplikatif, bukan sekadar wacana normatif. Penelitian ini memberikan pemetaan konseptual mengenai kesenjangan yang masih ada dalam kajian ekonomi makro Islam. Selain itu, kajian ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada pengembangan model kebijakan fiskal dan moneter berbasis ekonomi makro Islam. Secara akademik, penelitian ini memperkaya diskursus ekonomi Islam dalam konteks kebijakan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan sosial berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhinda, C. (2025). Integrasi Kearifan Lokal Dalam Komunikasi Kebijakan Publik Untuk Pengelolaan Pedagang Kaki Lima: Pendekatan Partisipatif Dan Kontekstual Di Kota-Kota Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(05 Oktober), 8219–8230.
- Al Hajry, A. D., & Mu'is, A. (2025). Prinsip Hukum Ekonomi Islam: Memahami Larangan Riba Di Era Rasulullah. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 6(2), 368–379.
- Febriyanti, R., & Sapa, N. B. (2025). Keadilan Distributif Dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep Dan Implementasinya. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 63–75.
- Fernandya, S., Yuwono, T., & Al-Firdaus, L. K. (2022). Pengentasan Masalah Sosial Melalui People Centered Development Guna Memaksimalkan Pembangunan di Indonesia. *Reformasi*, 12(1), 121–132.
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal Di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi Dan Implikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146–167.
- Huda, N. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Prenada Media.
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan sosial di Indonesia perspektif ekonomi islam. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(2), 243–260.
- Lubis, R. P. (2024). *Kebijakan Fiskal Dan Moneter*. Serasi Media Teknologi.
- Moleong, L. (2010). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Movitaria, M. A., Ode Aman, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). Penelitian Grounded Theory. Dalam *Metodologi Penelitian* (hlm. 54–60). CV. Afasa Pustaka.
- Putra, B. E. P., Rizqi, A., Alfianti, N., Aziz, A., Rosviana, M. I., Prastomo, R., & Shyaiim, M. A. (2024). *Ekonomi Makro Islam Dan Penerapan Di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Syamsiah, S. S. (2025). *Ekonomi Makro Islam: Teori, Kebijakan dan Aplikasi Syariah Dalam Perekonomian Modern*. PT. Nas Media Indonesia.
- Yulianto, A., Kamaluddin, S., Kamalia Sani, S., Anna Zakiyah Hastriana, M., Rahmatillah, M. N., Adawiyah, R., Utami, P., Sy, M., Mulyadi, S. A., & Yurda Indari, S. (2025). *Ekonomi Syariah Dan Keadilan Sosial*. CV Rey Media Grafika.
- Zakiah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37–52.